



# RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI  
2020-2024

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,  
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
2022



# RENCANA STRATEGIS

**DIREKTORAT PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI  
2020-2024**

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,  
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**  
2022

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya Rancangan Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020-2024 dapat disusun sesuai waktu yang telah ditentukan.

Rencana Strategis sebagai dokumen utama yang memuat visi dan misi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta kebijakan, tujuan strategis, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan (IKK) pembangunan bidang Pendidikan Anak Usia Dini, menjadi salah satu pedoman pelaksanaan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Rencana Strategis ini akan menjadi dasar dan pedoman dalam menyusun: (1) Rencana Kerja Tahunan (RKT); (2) Perjanjian Kinerja (PK); (3) Rencana Aksi; (4) Program dan kegiatan pelayanan PAUD secara terukur dan terarah; dan (5) Laporan Kinerja. Selain itu, Rencana Strategis ini menyajikan sasaran, target, dan strategi pencapaian yang dilakukan melalui peningkatan mutu dan akses layanan PAUD yang didukung dengan kerangka implementasi dan perkiraan kebutuhan biaya penyelenggaraan PAUD yang merata dan berkualitas dalam kurun waktu 2020-2024, mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian program untuk penjaminan mutu dan memastikan bahwa penyelenggaraan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana dengan mendayagunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Jakarta, Mei 2022  
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini



Muhammad Hasbi  
NIP 197306231993031001

# DAFTAR ISI

Kata pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Kondisi Umum .....	2
C. Permasalahan dan Potensi .....	5
<b>BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN.....</b>	<b>12</b>
A. Visi Direktorat PAUD.....	12
B. Misi Direktorat PAUD .....	13
C. Tata Nilai Direktorat PAUD .....	14
D. Tujuan Direktorat PAUD .....	15
E. Sasaran Kegiatan Direktorat PAUD .....	16
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ...</b>	<b>17</b>
A. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat PAUD .....	17
B. Kerangka Regulasi.....	18
C. Kerangka Kelembagaan .....	20
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN TARGET PENDANAAN .....</b>	<b>22</b>
A. Target Kinerja .....	22
B. Kerangka Pendanaan.....	23
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>24</b>
Referensi .....	25
Lampiran .....	26

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pendidik PAUD Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	9
Tabel 2.1	Tujuan Direktorat PAUD .....	16
Tabel 2.2	Program dan Sasaran Program (SP) Direktorat PAUD .....	16
Tabel 3.1	Arah dan Kebutuhan Regulasi Kemendikbudristek .....	18
Tabel 4.1	Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja Direktorat PAUD Tahun 2022-2024 .	22
Tabel 4.2	Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Direktorat PAUD periode 2020-2024 .....	23

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Capaian APK PAUD Tahun 2018-2021 .....	3
Gambar 1.2	Pertumbuhan Satuan PAUD 2018-2021 .....	3
Gambar 1.3	Pertumbuhan Akreditasi Satuan PAUD .....	4
Gambar 1.4	Analisis Permasalahan dan Potensi dengan <i>Balance Scorecard</i> .....	5
Gambar 1.5	Perbandingan APK PAUD dengan negara-negara lain.....	6
Gambar 1.6	Data Satu Desa Satu PAUD .....	7
Gambar 1.7	Data Pendidik PAUD Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	8
Gambar 2.1	Profil Pelajar Pancasila .....	12
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Direktorat PAUD .....	20

## **BAB I** Pendahuluan

### A. Latar belakang

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memegang peranan yang penting bagi perkembangan seorang anak. Berbagai hasil penelitian di bidang ilmu psikologi dan pendidikan menunjukkan bagaimana stimulasi yang diberikan pada jenjang PAUD akan berdampak positif terhadap perkembangan sosial, emosi, kognitif, bahasa, dan juga moral seorang anak. Anak yang memperoleh stimulasi sejak dini akan memiliki prestasi akademis yang cenderung lebih baik di masa yang akan datang.

PAUD juga memiliki peranan yang penting dalam pembangunan sebuah bangsa. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan keempat: “memastikan pendidikan bermutu yang inklusif dan berkesetaraan dan menyediakan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua”, secara spesifik mencantumkan kesetaraan akses terhadap layanan PAUD berkualitas sebagai sebuah indikator pembangun bangsa. Hal ini menunjukkan terdapatnya ortodoksi global akan pentingnya PAUD dalam menentukan arah pembangunan sebuah negara.

Penelitian yang memenangkan Hadiah Nobel oleh Heckman (2011) memperkuat ortodoksi tersebut dengan menyimpulkan bahwa program PAUD yang komprehensif,

mulai dari lahir hingga usia 5 tahun, dapat menghasilkan pengembalian ekonomi yang lebih tinggi daripada yang program prasekolah yang hanya melayani anak usia 3 hingga 4 tahun. Namun demikian, Heckman (2011: 33) mengingatkan bahwa “... anak yang kurang beruntung secara ekonomi dan kemudian memperoleh pendidikan keluarga yang buruk jauh lebih dirugikan daripada anak dengan latar belakang ekonomi yang sama tapi memperoleh pendidikan keluarga yang berkualitas tinggi”. Dengan kata lain, pendidikan keluarga yang berkualitas merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari program PAUD.

Di Indonesia, telah dikembangkan berbagai strategi untuk meningkatkan akses dan mutu PAUD. Dalam kerangka peraturan, PAUD di Indonesia didefinisikan sebagai “suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut” (Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Untuk memastikan penyediaan dan penyelenggaraan PAUD berkualitas, Pemerintah Indonesia telah merumuskan standar nasional PAUD, yang dirumuskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik

Indonesia, Nomor 137 Tahun 2014. Baru-baru ini, sebagai bentuk komitmen terhadap Agenda Pendidikan 2030, pemerintah juga telah membuat inisiatif terobosan dengan meluncurkan wajib satu tahun pendidikan pra-sekolah dasar untuk semua anak Indonesia (Peraturan Presiden Nomor 59/2017).

Terlepas dari komitmen global dan nasional, dan berbagai langkah terobosan yang telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan PAUD dalam periode yang lalu (2015-2019), terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan untuk arah dan kebijakan strategis pengembangan PAUD nasional selanjutnya. Hal-hal tersebut meliputi kemajuan teknologi, perkembangan pandemi COVID 19, dan perubahan paradigma pendidikan global.

**Pertama**, kemajuan teknologi mendorong terwujudnya berbagai terobosan di segala sektor kehidupan manusia. Baik di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya, berbagai kata kunci seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, *big data*, *3D printing* dan lain sebagainya terus menjadi jargon yang didengungkan. Sektor pendidikan pun tak luput dari pesatnya perkembangan teknologi ini. Terlepas dari argumentasi dan asumsi antara Revolusi Industri 4.0 atau Masyarakat 5.0, layanan PAUD di Indonesia perlu memanfaatkan sekaligus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terjadi.

**Kedua**, pandemi COVID 19 telah menjadikan mengubah wajah pendidikan di dunia dan Indonesia. Hidup dan kehidupan lebih dari 50 juta anak dan keluarga di Indonesia berubah selamanya. Namun demikian, semua lapisan dan masyarakat peduli pendidikan di Indonesia menolak untuk menghentikan pembelajaran. Para guru dan tenaga kependidikan bekerja tanpa lelah untuk mempersiapkan pembelajaran jarak jauh untuk setiap peserta didik di mana pun mereka berada. Sejalan dengan

antisipasi pertama sebelumnya, layanan PAUD perlu mengupayakan terwujudnya prasyarat pembelajaran pada periode disrupsi ini, yaitu: infrastruktur digital, perangkat digital, kurikulum digital, dan pengembangan profesional.

**Ketiga**, senada dengan antisipasi pertama dan kedua, paradigma pendidikan global telah berubah. Melihat apa yang telah terjadi di berbagai belahan dunia, sistem pendidikan telah selamanya berubah. Keluarga dan pendidik mengalami proses kegiatan belajar mengajar yang baru. Alat, teknik, dan inovasi baru telah dan akan terus ditemukan, digunakan, dan dialami.

Dengan mempertimbangkan tiga antisipasi di atas, Direktorat PAUD berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa demi mewujudkan layanan PAUD berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Rencana strategis (Renstra) Direktorat PAUD Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan PAUD sebagai pondasi bagi pembangunan Sumber Daya Manusia dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

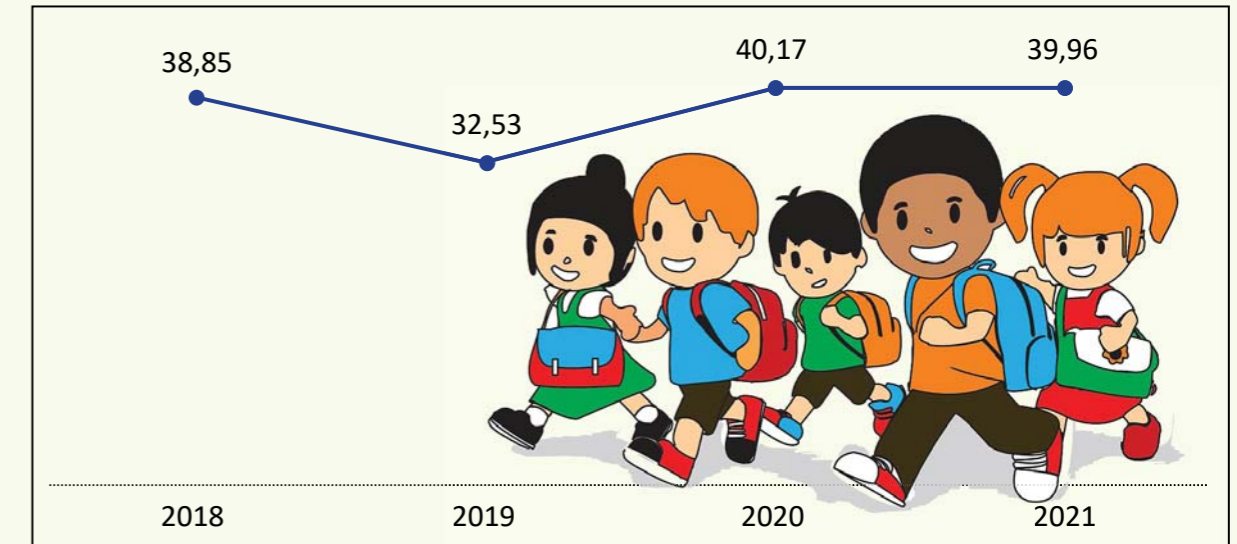
## B. Kondisi Umum

PAUD merupakan kunci keberhasilan pembangunan SDM sepanjang hayat. Anak usia dini yang dibekali dengan pendidikan yang berkualitas memiliki kecerdasan sosio-emosional dan kesiapan sekolah yang lebih baik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa PAUD memiliki dampak jangka panjang, dan bahkan turut memberi imbal hasil pada pertumbuhan ekonomi suatu negara (Heckman, 2011; Waber dkk, 2007; OECD, 2017).

## 1. Angka Partisipasi PAUD

Jumlah anak yang menikmati layanan PAUD terus bertambah setiap tahun. Hal ini tercermin dari tingkat angka partisipasi kasar (APK), atau jumlah anak yang menikmati layanan PAUD di suatu daerah. Capaian ini merupakan kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Gambar 1.1 Capaian APK PAUD Tahun 2018-2021



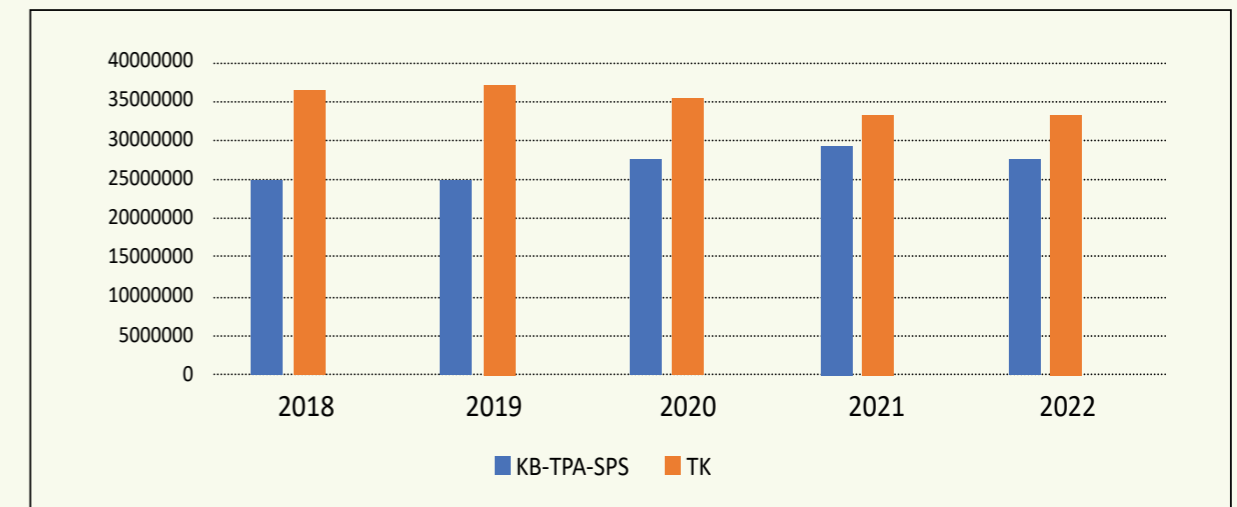
Sumber: <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

Program-program yang telah dijalankan untuk meningkatkan APK PAUD seperti Gambar 1.1 di atas adalah: Bantuan PAUD afirmasi yang mampu mendorong tumbuhnya satuan PAUD.

## 2. Pertumbuhan Satuan PAUD

Dari sisi jumlah, satuan PAUD di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun (Lihat Gambar 1.2).

Gambar 1.2 Pertumbuhan Satuan PAUD 2018-2022



Sumber: <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/> (2018-2021)  
<https://dapo.kemdikbud.go.id/pd> (2022)

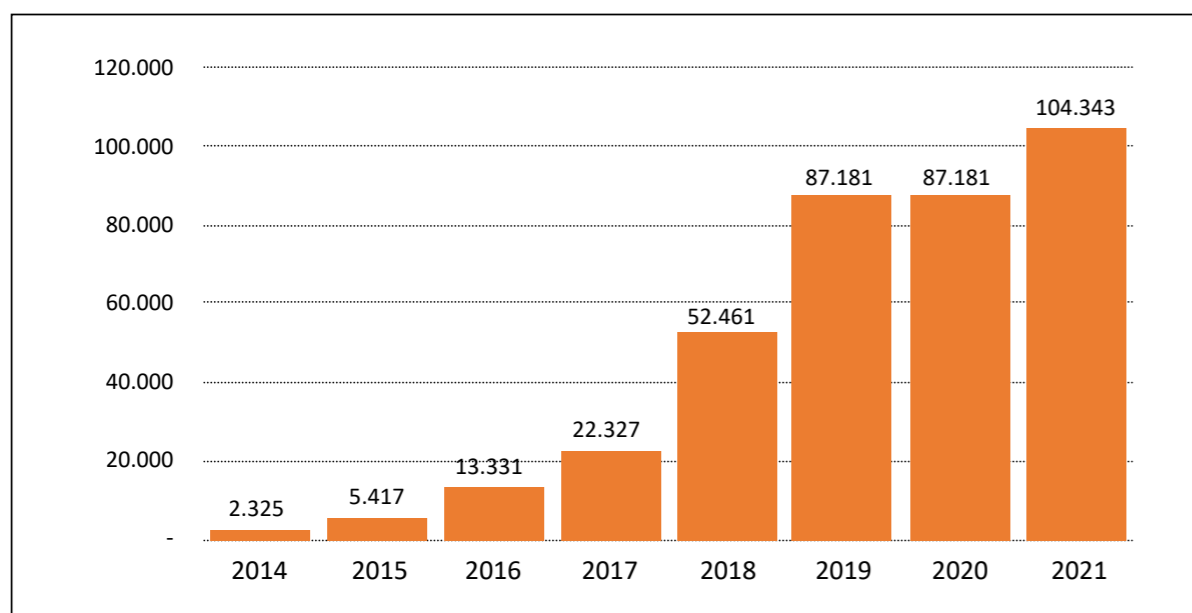
Pemerintah mendorong satuan PAUD untuk menjadi PAUD berkualitas yang menegaskan bahwa layanan PAUD tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan saja namun juga memantau dan mendukung terpenuhinya kebutuhan esensial anak di luar pendidikan, yaitu kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). Selain itu, pemerintah terus mendorong setiap kota/kabupaten untuk memiliki satuan PAUD yang memiliki layanan holistik integratif (PAUD HI) yang bekerja sama dengan Posyandu agar pelayanan kepada anak usia dini memenuhi kebutuhan esensial anak.

Dorongan ini sesuai dengan dan Peraturan Menteri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas PAUD HI yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan PAUD HI. Data pada tahun 2021, terdapat 56.193 Satuan PAUD yang memenuhi minimal 6 indikator PAUD HI dari 204.678 satuan PAUD keseluruhan. Berdasarkan *baseline* dari penyempurnaan Renstra Kemendikbud Ristek tahun 2020, terdapat 9,73% kabupaten/kota yang telah menyediakan layanan PAUD HI. Layanan PAUD HI tersebut dipenuhi dengan: memiliki peraturan bupati/wali kota tentang PAUD HI; membentuk gugus tugas PAUD HI kabupaten/kota; menyusun rencana aksi daerah (RAD) PAUD HI; menyosialisasikan kebijakan pemerintah daerah tentang PAUD HI dan gugus tugas PAUD HI; melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan PAUD HI di satuan PAUD; dan melakukan pendampingan ke satuan PAUD terkait penyelenggaraan PAUD HI.

### 3. Mutu PAUD

Pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu PAUD. Beragam upaya dilakukan, misalnya melalui akreditasi satuan PAUD dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Akreditasi lembaga PAUD dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD-PNF.

Gambar 1.3 Pertumbuhan Akreditasi Satuan PAUD



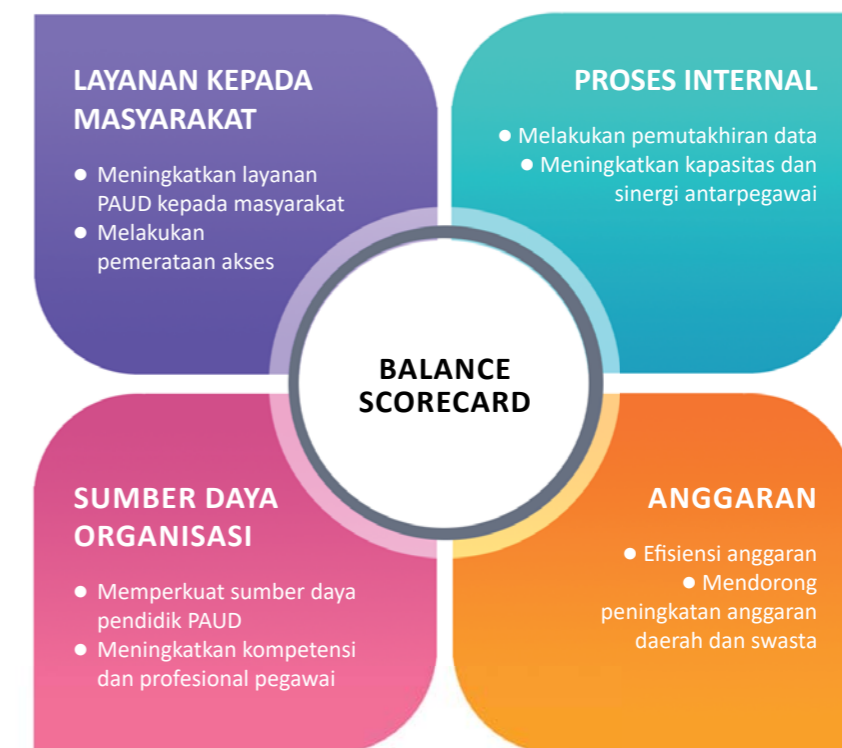
Sumber: BAN PAUD dan PNF Tahun 2021

Secara jumlah peningkatan satuan PAUD yang terakreditasi meningkat lebih dari enam belas kali lipat antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Bila dilihat dari capaian persentase terhadap total satuan PAUD, maka rata-rata tingkat penambahan per tahun dalam periode 2015-2021 adalah 50,53% per tahun.

### C. Permasalahan dan Potensi

Walau telah terjadi peningkatan dalam angka partisipasi pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan, masih terdapat permasalahan dalam upaya memajukan pendidikan anak usia dini. Bagian ini akan membahas permasalahan PAUD dan dianalisis dengan metode *balance scorecard*. Metode ini dipilih karena cukup efektif mengukur kinerja sebuah perusahaan ataupun organisasi dalam skala besar. Metode ini memiliki empat perspektif yakni Misi, Proses internal, sumber daya organisasi, dan anggaran.

Gambar 1.4 Analisis Permasalahan dan Potensi dengan *Balance Scorecard*



Sumber: Diadaptasi dari Kaplan & Norton (1992)

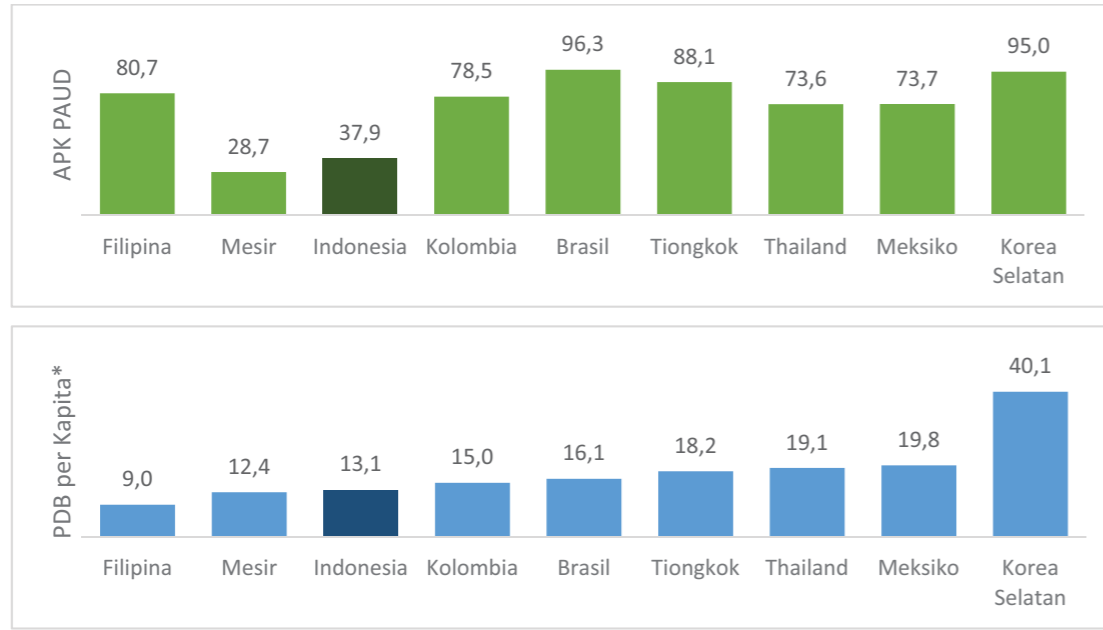
#### 1. Layanan kepada Masyarakat

Salah satu tugas Direktorat PAUD adalah meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan akses dan kualitas PAUD. Sejumlah permasalahan atau tantangan yang dihadapi adalah rendahnya angka partisipasi.

#### Angka Partisipasi PAUD

Angka partisipasi PAUD Indonesia masih jauh dibanding negara-negara lain. Gambar 1.5 menyangdingkan angka partisipasi PAUD dengan pendapatan perkapita sejumlah negara.

**Gambar 1.5 Perbandingan APK PAUD dengan negara-negara lain**



Catatan: \*) PDB per Kapita dalam ribuan dolar AS, disetarakan dengan Paritas Daya Beli 2000

Sumber: Dokumen Roadmap Pendidikan, 2020

Seperti terlihat dalam Gambar 1.5, angka partisipasi PAUD Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan angka partisipasi negara lain yang hampir semuanya telah mencapai lebih dari 70%. Adapun angka partisipasi PAUD Indonesia berada di bawah 40%.

Dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki Gross Domestic Product (GDP) lebih rendah seperti Filipina dan Mesir, Indonesia memang telah memiliki angka partisipasi PAUD yang lebih baik. Akan tetapi, Indonesia tidak bisa berpuas diri dan telah berketetapan untuk menjadi negara maju, sehingga memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpendidikan baik.

Oleh karena itu, acuan Indonesia haruslah negara-negara yang lebih maju. Dibandingkan dengan Kolombia, negara berkembang lain dengan GDP yang sedikit lebih tinggi dari Indonesia, dengan selisih kurang dari 20%, terlihat ketimpangan besar dalam angka partisipasi PAUD. Angka

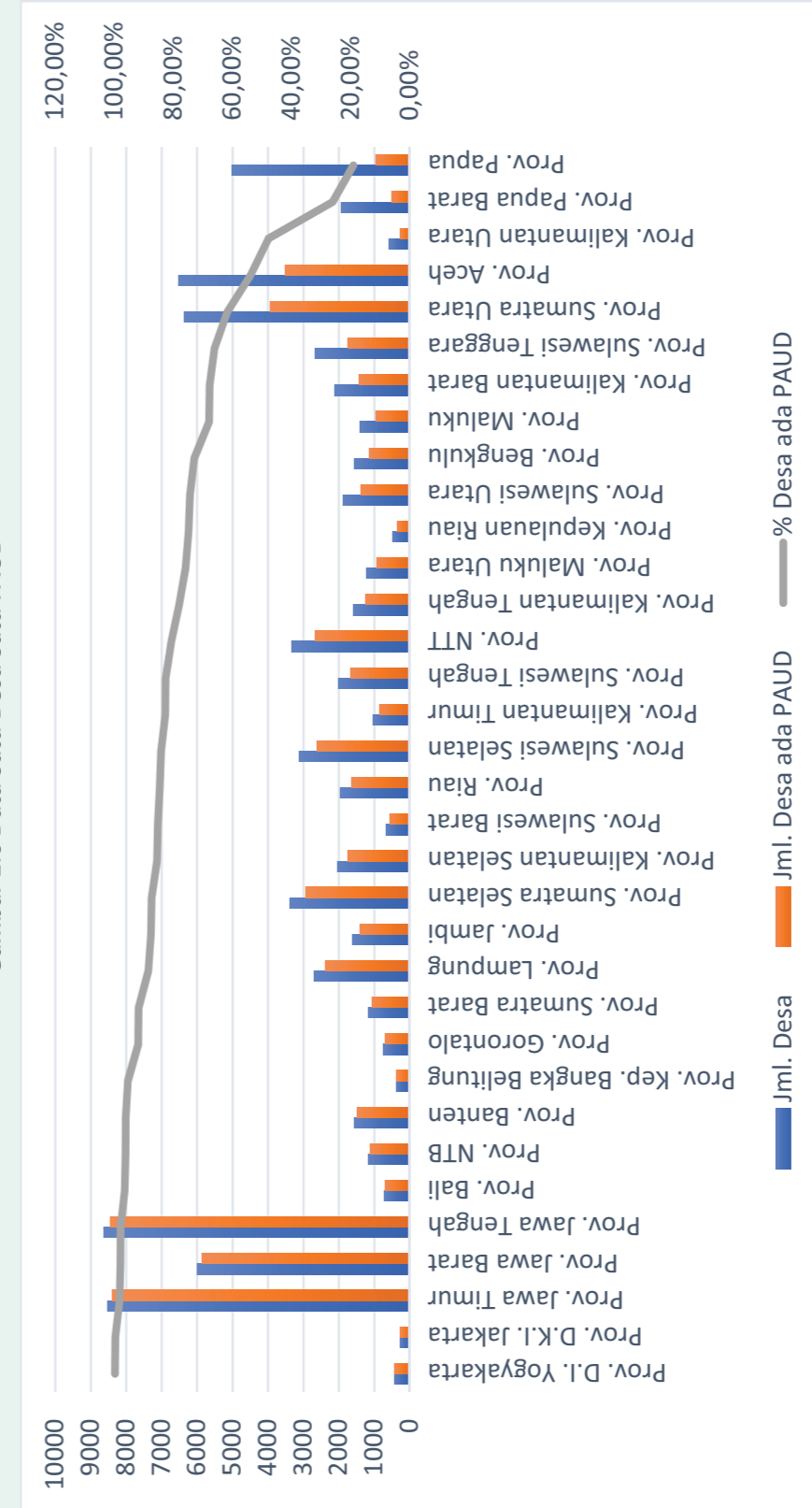
partisipasi PAUD Kolombia (76,5%) hampir dua kali lipat angka partisipasi PAUD Indonesia (37,9%).

Ada beberapa kemungkinan penyebab rendahnya angka partisipasi PAUD di Indonesia. Pertama, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini (golden years) masih rendah. Kedua, akses layanan PAUD saat ini masih terbatas. Masih ada sekitar 30% atau 25.000 desa di Indonesia yang belum memiliki lembaga PAUD.

### Pemerataan Akses

Akses layanan PAUD di Indonesia belum merata. Masih banyaknya desa yang belum terlayani PAUD. Ini merupakan tantangan tersendiri dalam rangka peningkatan dan pemerataan akses layanan PAUD. Berdasar data yang ada, sampai tahun 2020 masih terdapat 22.629 (26,85%) desa yang belum memiliki PAUD. Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat belum mencapai 50% dari jumlah desa

**Gambar 1.6 Data Satu Desa Satu PAUD**



Sumber: Dapodik PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2022

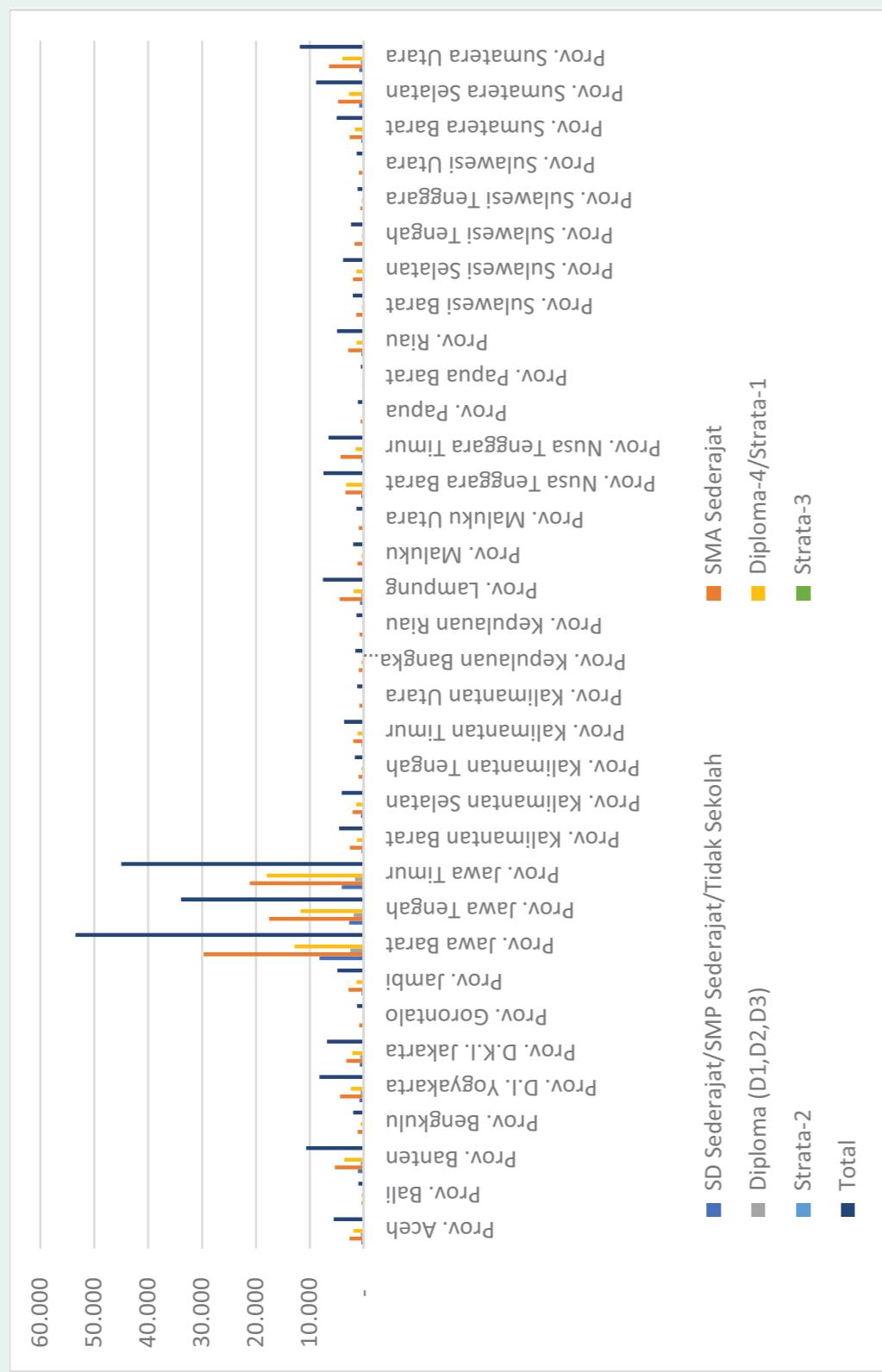
## 2. Sumber Daya Organisasi

Sumber daya adalah hal terpenting dalam peningkatan kinerja Direktorat PAUD. Sumber daya ini terkait dengan peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

Indonesia memiliki pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang kerap bekerja tanpa pamrih dan nrimbalan. Hal ini merupakan permasalahan yang kita hadapi bersama, namun ini sekaligus menjadi potensi dan modal sumber daya manusia yang besar untuk memajukan PAUD di Indonesia.

Hingga tahun 2020, jumlah pendidik PAUD yang secara resmi tercatat di Dapo PAUD Dikmas mencapai 541.400 orang. Dari jumlah tersebut, 44,28% di antaranya hanya berpendidikan SMA ke bawah dan terbanyak merupakan pendidik PAUD nonformal (68,58%). Ini merupakan tantangan besar, karena sesuai Standar Nasional PAUD, pendidik PAUD mestinya berpendidikan S-1 atau D-4. Data selengkapnya dapat diperiksa pada lampiran.

Gambar 1.7 Data Pendidik PAUD Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tabel 1.1 Data Pendidik PAUD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Provinsi	SD Sederajat/ SMP Sederajat/ Tidak Sekolah	SMA Sederajat	Diploma (D1, D2, D3)	Diploma-4/ Strata 1	Strata-2	Strata-3	Total
Aceh	448	2,645	557	1,909	11	-	5,570
Bali	88	404	108	415	3	-	1,018
Banten	1,091	5,364	564	3,632	22	-	10,673
Bengkulu	166	1,137	92	572	4	-	1,971
D.I. Yogyakarta	805	4,383	596	2,391	39	-	8,214
DKI Jakarta	747	3,236	686	2,110	54	-	6,833
Gorontalo	91	851	26	286	-	-	1,254
Jambi	394	2,851	279	1,354	4	-	4,882
Jawa Barat	8,216	29,718	2,512	12,831	201	5	53,483
Jawa Tengah	2,713	17,560	1,863	11,703	80	1	33,920
Jawa Timur	4,101	21,152	1,615	18,011	117	1	44,997
Kalimantan Barat	378	2,592	310	1,280	13	-	4,573
Kalimantan Selatan	491	2,078	101	1,394	12	-	4,076
Kalimantan Tengah	169	980	79	433	5	1	1,667
Kalimantan Timur	348	1,944	175	1,156	18	1	3,642
Kalimantan Utara	128	822	44	221	8	-	1,223
Bangka Belitung	120	937	52	459	-	-	1,568
Kepulauan Riau	274	775	39	267	2	-	1,357
Lampung	699	4,490	486	1,875	15	1	7,566
Maluku	284	1,171	87	426	15	-	1,983
Maluku Utara	108	942	120	174	5	-	1,349
NTB	429	3,413	337	3,290	19	-	7,488
NTT	450	4,306	266	1,510	12	-	6,544
Papua	132	602	67	281	3	-	1,085
Papua Barat	109	281	23	125	2	-	540
Riau	426	2,906	273	1,341	8	-	4,954
Sulawesi Barat	191	1,424	77	343	1	-	2,036
Sulawesi Selatan	232	2,002	216	1,383	14	-	3,847
Sulawesi Tengah	206	1,716	84	354	5	-	2,365
Sulawesi Tenggara	55	636	85	368	5	-	1,149
Sulawesi Utara	131	914	23	239	5	-	1,312
Sumatera Barat	443	2,608	310	1,650	9	-	5,020
Sumatera Selatan	844	4,775	455	2,746	34	-	8,854
Sumatera Utara	855	6,459	554	3,951	44	-	11,863
<b>Jumlah</b>	<b>26,362</b>	<b>138,074</b>	<b>13,161</b>	<b>80,480</b>	<b>789</b>	<b>10</b>	<b>258,876</b>

Sumber: Dapo PAUD dan Dikmas, 2020



### Tenaga Kependidikan PAUD

Tenaga kependidikan untuk PAUD adalah Kepala sekolah, pengelola, penyelenggara, pengawas TK, penilik PAUD, dan pengasuh serta penjaga di satuan PAUD. Mereka adalah bukan PNS, kecuali pengawas TK atau Penilik PAUD. Di lembaga PAUD nonformal, sebagian besar tenaga kependidikan merupakan tenaga sukarela. Jikalau ada yang mendapatkan gaji, jumlahnya sangat tidak memadai.

### Penilik dan Pengawas PAUD

Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (Permenpan RB, 2010). Tugas pokok penilik adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program. Sedangkan Pengawas PAUD bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendali mutu PAUD di wilayah yang menjadi tugasnya.

### Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai Direktorat PAUD

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan motor penggerak Direktorat PAUD. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk membangun sistem kepegawaian yang baik. Peralihan sebagian besar jabatan struktural administrasi menjadi jabatan fungsional tentu berdampak pada organisasi. Butuh penyesuaian dan adaptasi dari seluruh pegawai.

Beragam upaya yang dilakukan Direktorat PAUD dalam pengembangan karir dan kompetensi ASN adalah dengan Pendidikan dan Pelatihan atau yang biasa dikenal dengan istilah Diklat. Output utama dari pelaksanaan Diklat adalah

untuk menghasilkan SDM internal yang berkualitas dan memiliki kompetensi guna mendukung manajemen pelaksanaan tugas Direktorat PAUD. Sejumlah diklat teknis telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi teknis yang diperlukan sebagai ASN. Diklat teknis ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan karir PNS agar sejalan dengan kebutuhan perkembangan organisasi. Diklat yang telah diikuti para pegawai antara lain Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diklat keuangan, perencanaan dll. Namun, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah minimnya jumlah pegawai usia produktif di Direktorat PAUD.

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai Direktorat PAUD merupakan salah satu amanat reformasi birokrasi bidang kepegawaian. Direkoratkan terus berupaya mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). ASN Direktorat PAUD memiliki peran strategis dalam peningkatan layanan PAUD kepada masyarakat. Seluruh ASN di Direktorat PAUD harus mampu bekerja lebih profesional, andal, bersikap disiplin, jujur, adil dan tranparan dalam melaksanakan tugas.

### 3. Proses Internal

Dalam proses internal, terdapat dua permasalahan yang harus diatasi bersama yaitu:

#### Penguatan sinergi antarpegawai

Perubahan nomenklatur membawa dampak kepada para pegawai. Direktorat PAUD beralih dari Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat menjadi Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah. Koordinasi dan sinkronisasi program dengan Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD juga menjadi tantangan tersendiri. Sebab upaya

peningkatan layanan PAUD tidak akan terlepas dari peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

### Pemutakhiran data

Data mempunyai fungsi yang sangat penting dalam perencanaan, dan pengambilan kebijakan. Ia ibarat kompas yang memandu arah. Pemutakhiran data PAUD harus terus dilakukan agar dapat dijadikan dasar penetapan kebijakan, termasuk penetapan alokasi anggaran. Namun, banyak pengelola satuan pendidikan yang masih enggan melakukan pemutakhiran data di Dapodik. Padahal data induk tersebut merupakan sistem pendataan terpadu di sektor pendidikan. Oleh karena itu, seluruh lembaga harus terus melakukan pemutakhiran.

### 4. Anggaran

Selama ini alokasi anggaran PAUD masih belum sebanding dengan jumlah sasaran yang ada. Anggaran Direktorat PAUD sejak 2008 s.d. 2019 rerata di bawah Rp 1 triliun, padahal jumlah anak 3-6 tahun pada tahun 2019 mencapai 6.423.286 anak (Dapo PAUD dan Dikmas, 20 Mei 2020). Anggaran Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD pun mengalami nasib serupa, rerata kurang dari Rp 1 triliun. Jumlah ini pun sebagian besar diperuntukkan bagi tunjangan guru TK.

Hal ini cukup ironis, sebab fakta riset menunjukkan bahwa investasi PAUD memberikan imbal hasil tertinggi. Riset di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa setiap satu dolar yang diinvestasikan untuk PAUD memberikan imbal hasil atau *return of investment* sebesar 13% per tahun. Selain itu, dalam jangka panjang, PAUD yang berkualitas dapat menekan tingkat pengangguran dan tingkat kriminalitas (Heckman, 2011). Oleh karena itu,

permasalahan anggaran ini harus diatasi dengan cara melakukan efisiensi anggaran dan menentukan prioritas.

Salah satu strategi yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala keterbatasan anggaran adalah dengan mendorong inisiatif pemerintah daerah dan swasta. Oleh karena itu, Direktorat PAUD harus menjalin kemitraan atau kerja sama untuk mengembangkan program PAUD di Indonesia. Ini adalah sebuah keniscayaan. Pemerintah tidak dapat bergerak seorang diri, butuh peran serta swasta, organisasi mitra, perusahaan BUMN dan BUMD, serta masyarakat.

Kerja sama antara Direktorat PAUD dengan organisasi mitra dalam negeri juga perlu terus dijalin dan diperkuat untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu layanan PAUD. Kerja sama dapat dibangun dan diperkuat dengan berbagai pengurus Pusat PKK, Dharma Wanita, Kowani, HIMPAUDI, dan IGTKI. Selain itu, Kemendikbud juga bekerja sama dengan organisasi keagamaan seperti Dewan Masjid Indonesia, Majelis Pendidikan Kristen, dan lain sebagainya. Kerja sama dengan organisasi mitra ini sangat bermanfaat, sebab organisasi ini memiliki pengurus hingga ke tingkat kecamatan, bahkan desa. Melalui kerja sama ini, program PAUD diharapkan dapat tersebar hingga ke pelosok desa.

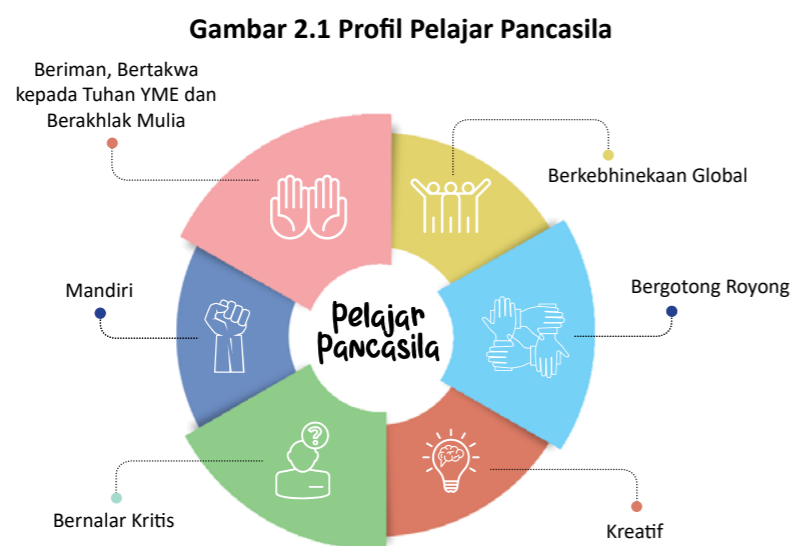
## BAB II Visi, Misi, Dan Tujuan

### A. Visi Direktorat PAUD

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, Direktorat PAUD memiliki komitmen untuk menjalankan dan mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia pada RPJMN Tahun 2020-2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, yaitu:

***“Mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.”***

Visi tersebut di atas mencerminkan komitmen Direktorat PAUD Kemendikbud Ristek dalam mendukung visi dan misi Presiden. PAUD merupakan modal penting dalam pembangunan generasi emas di bidang pendidikan yang akan membawa anak-anak Indonesia mencapai puncak prestasi dan karakter.



Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Direktorat PAUD juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

#### 2. Berkebinekaan global

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.

#### 3. Bergotong royong

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong-royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

#### 4. Mandiri

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya.

Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

#### 5. Bernalar kritis

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

#### 6. Kreatif

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global - dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya.

### B. Misi Direktorat PAUD

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Direktorat PAUD berkomitmen menjalankan Misi Presiden atau Nawacita kedua, yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia; Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Direktorat PAUD selaras dengan misi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua, yakni:

1. Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan anak usia dini.

### C. Tata Nilai Direktorat PAUD

Tata nilai merupakan pemandu arah sikap dan perilaku seluruh pegawai Direktorat PAUD. Tata nilai ini harus dilaksanakan sesuai dengan tata nilai Kemendikbud 2020-2024, yaitu:

#### 1. Integritas

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:

- a. Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan;
- b. Jujur dalam segala tindakan;
- c. Menghindari benturan kepentingan;
- d. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. Tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan;
- h. Tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; dan,
- i. Tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun di luar ketentuan.

#### 2. Kreatif dan inovatif

Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:

- a. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru;
- b. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan;
- c. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;
- d. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah;
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien;
- f. Tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai;
- g. Tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan,
- h. Tidak monoton

#### 3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai Kemendikbud sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu. Indikator dari nilai inisiatif adalah:

- a. Responsif melayani kebutuhan pemangku kepentingan;
- b. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi;
- c. Memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah;
- d. Tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan; dan

- e. Tidak sekedar mencari suara terbanyak, berlindung dari kegagalan, berargumentasi bahwa apa yang Anda lakukan telah disetujui oleh semua anggota tim.

#### 4. Pembelajar

Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Indikator yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:

- a. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman;
- b. Mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran;
- c. Berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja;
- d. Memanfaatkan waktu dengan baik;
- e. Suka mempelajari hal yang baru; dan,
- f. Rajin belajar/bertanya/berdiskusi.

#### 5. Menjunjung meritokrasi

Nilai menjunjung meritokrasi berarti memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:

- a. Berkompetisi secara profesional;
- b. Memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai;
- c. Memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja;
- d. Tidak sewenang-wenang;
- e. Tidak mementingkan diri sendiri;
- f. Menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya; dan,
- g. Mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme.

#### 6. Terlibat aktif

Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Nilai terlibat aktif terlihat dari indikator:

- a. Terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi kementerian;
- b. Memberikan dukungan kepada rekan kerja;
- c. Peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar (tidak apatis);
- d. Tidak bersifat pasif, sekedar menunggu perintah.

#### 7. Tanpa pamrih

Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai Kemendikbud, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya pegawai Kemendikbud memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama. Indikator nilai tanpa pamrih adalah:

- a. Penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan;
- b. Rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya;
- c. Menunjukkan perilaku 4S (senyum, sapa, sopan, dan santun);
- d. Tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa; dan
- e. Tidak berburuk sangka kepada rekan kerja.

### D. Tujuan Direktorat PAUD

Perumusan tujuan ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan besar Direktorat PAUD pada tahun 2020-2024 adalah: **“Melakukan transformasi non-reversibel pada Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia”**. Tujuan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan dan kebudayaan Indonesia harus mengalami transformasi perbaikan total agar

dapat menghadapi tantangan Abad 21, dan tidak boleh lagi berjalan ke arah sebaliknya, yang akan berarti kemunduran bangsa. Tujuan besar ini diejawantahkan dalam empat tujuan sebagaimana dapat dilihat di Tabel 2.1

Direktorat PAUD memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

**Tabel 2.1 Tujuan Direktorat PAUD**

No.	Tujuan	Target Keberhasilan
1.	Meningkatnya persentase kab/kota dengan angka kesiapan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) 3-6 tahun di atas 75	64,59% kab/kota dengan angka kesiapan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) 3-6 tahun di atas 75
2.	Meningkatnya persentase kab/kota yang menyediakan layanan PAUD HI	48,64% kab/kota yang menyediakan layanan PAUD HI
3.	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang menjadi sekolah penggerak	19.100 satuan pendidikan yang menjadi sekolah penggerak
4.	Meningkatnya Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	4,49% satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru
5.	Meningkatnya persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran	75% satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran

### E. Sasaran Program Direktorat PAUD

Sasaran Direktorat PAUD selaras dengan tujuan pembangunan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yaitu:

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan pertama** — Meningkatnya persentase kab/kota dengan angka kesiapan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) 3-6 tahun di atas 75.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan kedua** — Meningkatnya persentase kab/kota yang menyediakan layanan PAUD HI.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan ketiga** — Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang menjadi sekolah penggerak.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan keempat** — Meningkatnya Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan kelima** — Meningkatnya persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran. Berikut ini keenam sasaran program pendidikan anak usia dini.

**Tabel 2.2 Program dan Sasaran Program (SP) Direktorat PAUD**

No.	Program/Sasaran Program (SP)	Tujuan terkait
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Wajib Belajar		
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	1
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		
SP	Meningkatnya pencapaian perkembangan anak	2
SP	Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan	3, 4, 5

## BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

### A. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat PAUD

Arah kebijakan dan strategi Direktorat PAUD pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi pada pendidikan anak usia dini, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui (1) peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya, (2) peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan, (3) perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan, serta (4) penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Direktorat PAUD 2020-2024 bertujuan meningkatkan akses dan kualitas. Strategi tersebut yaitu,

- 1) Penguatan kebijakan PAUD yang berpusat pada anak. Direktorat mengembangkan standar capaian belajar yang menitikberatkan pada kreativitas anak.
- 2) Kampanye nasional perubahan paradigma tentang PAUD. Direktorat akan mengajak para guru dan orang tua agar menitikberatkan pada konsep *play-based learning*, bermain, bukan menekankan anak PAUD pada baca tulis hitung (*calistung*).
- 3) Memacu peningkatan kualitas PAUD dengan melakukan pendampingan integrasi layanan kesehatan, gizi, dan perlindungan anak.
- 4) Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam program PAUD, sebab peran serta keluarga akan sangat menentukan keberhasilan program PAUD.
- 5) Peningkatan akses PAUD melalui program Satu Desa Satu PAUD.
- 6) Memperkuat peran pemerintah daerah, swasta, BUMN/BUMD dan para Bunda PAUD untuk mengembangkan program PAUD hingga ke berbagai daerah.
- 7) Melakukan pemutakhiran sistem data PAUD yang terpadu, transparan, dan akuntabel
- 8) Memperjuangkan peningkatan anggaran PAUD di daerah.

## B. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada periode waktu tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Arah dan Kebutuhan Regulasi Kemendikbud**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1	Masukan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sumber : Renstra Kemdikbud 2020-2024 Permendikbud 22/2020)	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: 1. Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 2. Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan. 3. Standar pendidikan 4. muka( <i>online</i> ). 5. Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Direktorat Sekolah Dasar	Tahun 2021
2	Masukan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan kebijakan pendidikan saat ini. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: 1. Pembagian kewenangan penyelenggaraan pendidikan. 2. Keterlibatan orang tua dalam PAUD	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pusat Penguatan Karakter 3. Kementerian Kesehatan 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
3	Masukan Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.	Hal yang menjadi fokus penyusunan yaitu: 1. Penyesuaian kebijakan data terpadu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Penyusunan penyelenggaraan data sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. BAN PAUD dan PNF	Tahun 2021
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Satuan Pendidikan Kerja Sama, mengubah/mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan kebijakan pendidikan saat ini. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: 1. Syarat pendirian SPK; 2. Mekanisme pendirian SPK; 3. Pemenuhan Standar dan pembinaan; 4. Akreditasi SPK	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. BAN PAUD dan PNF	Tahun 2020
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus pada Jalur Formal	Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: 1. Ruang lingkup pendidikan khusus. 2. Penyelenggaraan pendidikan khusus. 3. Pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas. 4. Pendidikan untuk peserta didik cerdas istimewa. 5. Pendidikan untuk peserta didik bakat istimewa. 6. Tanggungjawab pembiayaan.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Direktorat Sekolah Dasar	Tahun 2023
6	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Biaya Satuan Pendidikan	Hal yang menjadi fokus penyusunan yaitu: 1. Jenis biaya satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 2. Sumber pembiayaan. 3. Kewenangan kepala sekolah dalam menetapkan besaran maksimal biaya pungutan. 4. Mekanisme pungutan oleh satuan pendidikan. 5. Pelaporan penggunaan dana hasil pungutan oleh satuan pendidikan. 6. Sanksi	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Biro Perencanaan dan Penganggaran 2. Direktorat Sekolah Dasar	Tahun 2021

## C. Kerangka Kelembagaan

### 1. Tugas dan fungsi

Direktorat PAUD mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang PAUD dan pendidikan layanan khusus pada PAUD.

Direktorat PAUD memiliki fungsi: penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada PAUD dan pendidikan layanan khusus pada PAUD;

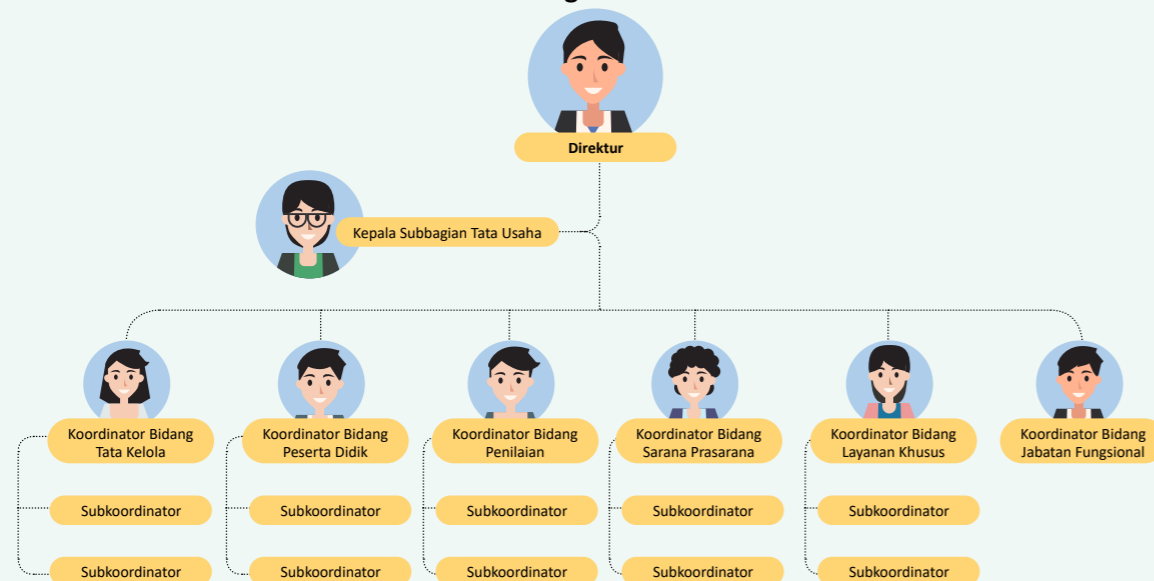
- penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada PAUD dan pendidikan layanan khusus pada PAUD;
- pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada PAUD dan pendidikan layanan khusus pada PAUD;
- pelaksanaan kebijakan di bidang standar peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada PAUD dan pendidikan layanan khusus pada PAUD;
- fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada PAUD dan pendidikan layanan khusus pada PAUD;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada PAUD dan pendidikan layanan khusus pada PAUD;
- penyiapan perumusan pemberian izin penyelenggaraan satuan PAUD yang diselenggarakan negara asing atau satuan PAUD kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang PAUD; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

### 2. Struktur organisasi

Struktur organisasi Direktorat PAUD mengalami perampingan sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo. Hal ini sesuai dengan semangat untuk melakukan efisiensi dan penyederhanaan birokrasi, dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat.

Struktur Direktorat PAUD tergambar:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Direktorat PAUD



Sumber: Permendikbud Ristek Nomor 28 Tahun 2021

### 3. Reformasi Birokrasi

Direktorat PAUD berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan secara berkesinambungan terhadap efektivitas birokrasi. Peningkatan reformasi birokrasi merupakan buah dari kerja keras seluruh pegawai. Pelaksanaan reformasi birokrasi telah tercermin dari perubahan kinerja seluruh pegawai dan komitmen kami untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat. Kami pun membiasakan para pegawai untuk berpikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box*), membenahi regulasi, memutakhirkan berbagai kebijakan dengan paradigma baru. Serangkaian upaya ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan aparatur yang bersih dan sigap melayani.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mengacu pada kebijakan yang telah digariskan dalam *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Secara bertahap, Direktorat PAUD juga menjalankan delapan program area perubahan Kemendikbudristek, yakni:

- Manajemen Perubahan
- Penguatan Pengawasan
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Penguatan Kelembagaan
- Penguatan Tata Laksana
- Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
- Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

# Target Kinerja dan Target Pendanaan

## A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi ditetapkan sasaran kegiatan yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan keluaran (*output*) dari satu atau beberapa kegiatan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian setiap sasaran kegiatan dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja kegiatan.

**Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja Direktorat PAUD Tahun 2022 – 2024**

Kode SK/IKK	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline	Target		
			2020	2022	2023	2024
SK 1	Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas					
IKK 1.1	Jumlah satuan PAUD menerima program afirmasi	Lembaga	-	105	108	110
SK 2	Meningkatnya capaian perkembangan PAUD yang berkualitas					
IKK 2.1	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	%	25,78	30,66	33,12	35,56
SK 3	Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas					
IKK 3.1	Jumlah PAUD penggerak	Lembaga	-	2.000	3.150	4.300
IKK 3.2	Persentase satuan PAUD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	%	-	0,98	1,54	2,11
IKK 3.3	Persentase satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	%	-	0,98	1,54	2,11
IKK 3.4	Persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	%	9,54	10,21	10,88	12,23
SK 4	Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini					
IKK 4.1	Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	Predikat	A	A	A	A
IKK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai		85		

Sasaran kegiatan tersebut ditetapkan untuk mendukung sasaran program di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, yaitu:

1. Sasaran Program (*Outcome*): Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah

Indikator Kinerja Program:

- a. Persentase kab./kota dengan angka kesiapan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) 3-6 tahun di atas 75

2. Sasaran Program (*Outcome*): Meningkatnya pencapaian perkembangan anak

Indikator Kinerja Program:

- a. Persentase kab./kota yang menyediakan layanan PAUDHI

3. Sasaran Program (*Outcome*): Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan

Indikator Kinerja Program:

- a. Jumlah satuan pendidikan yang menjadi sekolah penggerak
- b. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru

- c. Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran

4. Sasaran Program (*Outcome*): Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas

Indikator Kinerja Program:

- a. Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah minimal BB
- b. Jumlah Satker yang dibina menuju WBK

## B. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Direktorat PAUD periode 2020-2024**

Sasaran Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Miliar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata dan berkualitas	300.43	360.51	396.57	475.88	571.06

Rancangan Teknokratik Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PAUD tahun 2020-2024 ini disusun dalam rangka mewujudkan layanan PAUD yang merata dan berkualitas yang menjadi salah satu fokus pemerintah pada RPJMN IV. Oleh karena itu Renstra ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) penekanan fokus pada mutu pendidikan; (2) penguatan peran Direktorat PAUD sebagai satuan kerja pusat yang memiliki mandat menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria untuk diikuti oleh Pemerintah Daerah selaku pelaksana layanan PAUD; (3) penekanan pada program afirmasi terutama akses; dan (4) penguatan akuntabilitas dan transparansi.

Renstra menjabarkan visi beserta rencana sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas sasaran kegiatan yang mendukung sasaran program Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbud, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Rancangan Teknokratik Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan untuk digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan PAUD yang hendak dicapai pada periode 2020–2024, ataupun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan layanan PAUD. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memandatkan Renstra merupakan dasar dan acuan dalam menyusun (1) Rencana Kerja Tahunan; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Rencana Aksi; dan (4) Laporan Kinerja Tahunan.

Selain yang diuraikan di atas, Rancangan Teknokratik Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pelaksanaan layanan PAUD, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pelaksanaan layanan PAUD selama lima tahun mendatang.

## Referensi

- Heckman, J. (2011) The Economics of Inequality: The Value of Early Childhood Education. *American Educator*, 35, 31-47
- Kaplan, R. and Norton, D. (1992) The Balanced Scorecard—Measures That Drive Performance. *Harvard Business Review*, 79.
- Kemendikbud (2014) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Jakarta
- Kemendikbud (2022) Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024. Jakarta: Sekretariat Jenderal
- Kemendikbud (2020) Panduan Penyusunan Renstra. Jakarta: Biro Perencanaan
- Kemendikbud (2022) Rencana Strategis Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Ditjen PAUD, Dikdasmen
- OECD (2017), *Starting Strong V: Transitions from Early Childhood Education and Care to Primary Education, Starting Strong*, OECD Publishing, Paris: <https://doi.org/10.1787/9789264276253-en>.
- Sekretariat Negara (2004) Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta
- Waber DP, de Moor C, Forbes PW, Almlı CR, Botteron KN, (2007) The NIH MRI study of normal brain development: Performance of a population based sample of healthy children aged 6 to 18 years on a neuropsychological battery. *Journal of the International Neuropsychological Society*. 2007;13(5):729–746.



# Lampiran 1

## DEFINISI OPERASIONAL

### Rencana Strategis (Penyempurnaan)

#### Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

#### Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

#### Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2020 – 2024

Program : Pendidikan Anak Usia Dini dan Wajib Belajar 12 Tahun	
SS	: 1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
IKSS	: 1.1. Angka Kesiapan Sekolah
Definisi:	
Angka Kesiapan Sekolah (AKS) digunakan untuk mengukur kesiapan anak dalam memasuki jenjang pendidikan dasar (SD/Sederajat). Indikator ini menggambarkan seberapa banyak siswa kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya telah mengikuti PAUD	
AKS menghitung proporsi anak pada kelas 1 SD/Sederajat yang pernah mengikuti PAUD pada satu tahun sebelumnya terhadap keseluruhan anak pada kelas 1 SD/Sederajat.	
Metode Penghitungan:	
$Y = \frac{a}{b} \times 100\%$	
Keterangan:	
Y	= Angka Kesiapan Sekolah
a	= Jumlah siswa kelas 1 SD/Sederajat yang pernah mengikuti PAUD
b	= Jumlah siswa kelas 1 SD/Sederajat
Satuan	: Persen (%)
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Sumber Data	: BPS
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
Strategi Pencapaian	: Melalui Peningkatan kualitas pelaksanaan program transfer daerah (BOS, BOP, DAK Fisik) dan Program Afirmasi

## Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Wajib Belajar 12 Tahun

Program : Pendidikan Anak Usia Dini dan Wajib Belajar 12 Tahun	
SP	: Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
IKP	: 1.1.1. Persentase Kab/Kota dengan Angka Kesiapan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun diatas 75
Definisi:	
Angka Kesiapan Sekolah (AKS) digunakan untuk mengukur kesiapan anak dalam memasuki jenjang pendidikan dasar (SD/Sederajat). Indikator ini menggambarkan seberapa banyak siswa kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya telah mengikuti PAUD.	
AKS menghitung proporsi anak pada kelas 1 SD/Sederajat yang pernah mengikuti PAUD/Sederajat pada satu tahun sebelumnya terhadap keseluruhan anak pada kelas 1 SD/Sederajat.	
Metode Penghitungan:	
$= \frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota dengan proporsi anak pada kelas 1 SD/Sederajat yang pernah mengikuti PAUD pada satu tahun sebelumnya dengan presentase di atas 75}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	
Satuan	: Persen (%)
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Sumber Data	: BPS
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

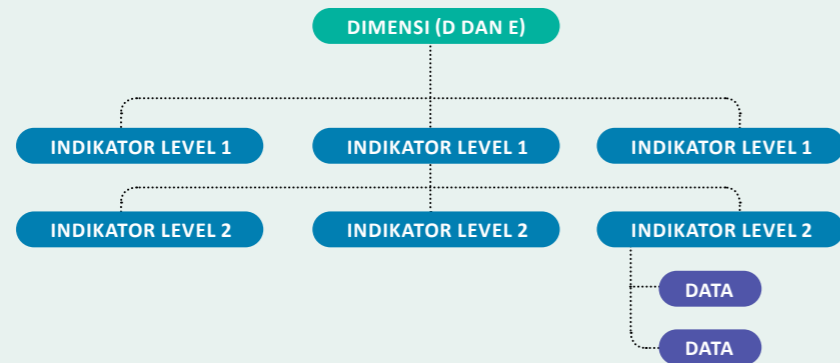
## Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Program : Pendidikan Anak Usia Dini dan Wajib Belajar 12 Tahun	
SK	: Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas
IKK	: 1.1.1.1. Jumlah satuan PAUD menerima program afirmasi
Definisi:	
Kebijakan afirmasi pendidikan merupakan momentum awal untuk tercapainya cita-cita akses pendidikan yang berkeadilan. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat konstitusi tidak akan pernah tercipta jika pendidikan hanya dinikmati oleh mereka di daerah yang dekat dengan pusat. Program afirmasi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah. Intervensi program afirmasi yang dilakukan mencakup afirmasi karena geografis (daerah khusus sesuai perundang-undangan yang berlaku) dan karena intervensi khusus (pencegahan anak rentan putus sekolah, peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan yang tidak mampu dari segi ekonomi).	
Perhitungan dilakukan pada jenjang PAUD.	
Metode Penghitungan:	
$\text{Jumlah Satuan Pendidikan jenjang PAUD yang menerima Program Afirmasi}$	
Satuan	: Lembaga
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Sumber Data	: APBN
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

Program	:	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SS	:	2. Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang
IKSS	:	1.1. Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD
Definisi:		
<p>Nilai Kualitas lingkungan belajar adalah perhitungan dari sejumlah indikator yang tergabung dalam dua kategori, yaitu i) kualitas proses pembelajaran, dan ii) kualitas pengelolaan satuan berdasarkan kerangka profil pendidikan anak usia dini. Pengukuran kualitas lingkungan belajar dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari kegiatan evaluasi sistem PAUD yang dilakukan oleh PUSMENDIK, BSKAP, Kemendikbudristek dengan mekanisme yang diatur dalam PP SNP Nomor 57 Tahun 2021, merujuk pada pasal 45, butir (c) dan (d). Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam mendorong keberhasilan IKSS ini melalui berbagai naskah pedoman kebijakan (NPK) yang dijadikan acuan oleh setiap satuan PAUD serta advokasi dan pendampingan ke daerah (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) agar dapat membina satuan PAUD untuk memenuhi indikator kualitas proses pembelajaran dan pengelolaan satuan PAUD.</p> <p>Kualitas Lingkungan Belajar PAUD, meliputi:</p> <p>A. Dimensi D: Kualitas Proses Pembelajaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D.1 Perencanaan untuk Proses Pembelajaran yang Efektif. <ul style="list-style-type: none"> <li>◊ D.1.1 Ketersediaan dokumen perencanaan pembelajaran yang lengkap.</li> <li>◊ D.1.2 Kesesuaian rencana pembelajaran dengan tujuan pembelajaran dan asesmen.</li> <li>◊ D.1.3 Pengaturan ruang kelas.</li> </ul> </li> <li>• D.2 Pendekatan Pembelajaran yang Sesuai untuk Anak Usia Dini. <ul style="list-style-type: none"> <li>◊ D.2.1 Keteraturan suasana kelas.</li> <li>◊ D.2.2 Penerapan disiplin positif.</li> <li>◊ D.2.3 Ekspektasi pendidik.</li> <li>◊ D.2.4 Perhatian dan dukungan pendidik.</li> <li>◊ D.2.5 Pembelajaran terdiferensiasi.</li> <li>◊ D.2.6 Panduan pendidik/<i>teachers' scaffolding</i>.</li> <li>◊ D.2.7 Pendekatan bermain-belajar.</li> <li>◊ D.2.8 Berpikir aktif.</li> <li>◊ D.2.9 Pembelajaran kontekstual.</li> </ul> </li> <li>• D.3 Muatan Pembelajaran yang Sesuai Kurikulum. <ul style="list-style-type: none"> <li>◊ D.3.1 Muatan agama dan budi pekerti.</li> <li>◊ D.3.2 Muatan identitas diri.</li> <li>◊ D.3.3 Muatan perilaku mandiri dan prososial.</li> <li>◊ D.3.4 Muatan PHBS dan penguatan motorik kasar dan halus.</li> <li>◊ D.3.5 Muatan pra-literasi.</li> <li>◊ D.3.6 Muatan kognitif.</li> </ul> </li> <li>• D.4 Asesmen yang Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. <ul style="list-style-type: none"> <li>◊ D.4.1 Ketersediaan dokumen evaluasi pembelajaran dan monitoring hasil belajar anak.</li> <li>◊ D.4.2 Umpan balik konstruktif.</li> </ul> </li> </ul> <p>B. Dimensi E: Kualitas Pengelolaan Satuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E.1 Ketersediaan Sarana Prasarana Esensial. <ul style="list-style-type: none"> <li>◊ E.1.1 Ketersediaan lahan.</li> <li>◊ E.1.2 Ketersediaan bangunan.</li> <li>◊ E.1.3 Ketersediaan tempat bermain/belajar.</li> <li>◊ E.1.4 Ketersediaan jaringan listrik.</li> <li>◊ E.1.5 Ketersediaan fasilitas sanitasi.</li> </ul> </li> </ul>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>◊ E.1.6 Ketersediaan APE.</li> <li>◊ E.1.7 Ketersediaan buku bacaan anak.</li> <li>◊ E.1.8 Ketersediaan perangkat TIK.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E.2 Indeks Iklim Keamanan dan Keselamatan Sekolah. <ul style="list-style-type: none"> <li>◊ E.2.1 Keamanan bangunan satuan.</li> <li>◊ E.2.2 Keamanan lingkungan satuan.</li> <li>◊ E.2.3 Ketersediaan P3K.</li> <li>◊ E.2.4 Indeks tidak terjadinya hukuman fisik.</li> <li>◊ E.2.5 Indeks antiperundungan.</li> <li>◊ E.2.6 Indeks antikekerasan seksual.</li> <li>◊ E.2.7 Skor sikap antikekerasan pendidik dan KS.</li> </ul> </li> <li>• E.3 Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah. <ul style="list-style-type: none"> <li>◊ E.3.1 Skor toleransi pendidik dan KS.</li> <li>◊ E.3.2 Skor komitmen kebangsaan pendidik dan KS.</li> <li>◊ E.3.3 Skor multikultural.</li> <li>◊ E.3.4 Skor konsepsi/pengetahuan/sikap pendidik terhadap anak berkebutuhan khusus.</li> </ul> </li> <li>• E.4 Indeks Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Pendidik. <ul style="list-style-type: none"> <li>◊ E.4.1 Belajar dari dan bersama orang lain.</li> <li>◊ E.4.2 Evaluasi praktik saat ini.</li> <li>◊ E.4.3 Penerapan praktik baru.</li> <li>◊ E.4.4 Penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran.</li> </ul> </li> <li>• E.5 Indeks Kepemimpinan dan Kebijakan Satuan yang Mendukung Refleksi dan Perbaikan Layanan.</li> <li>• E.6 Indeks Kemitraan dengan Orang Tua/Wali untuk Kesiambungan Stimulasi di Satuan dan di Rumah.</li> <li>• E.7 Indeks Layanan Holistik Integratif. <ul style="list-style-type: none"> <li>◊ E.7.1 Penyelenggaraan kelas orang tua.</li> <li>◊ E.7.2 Pencatatan data tumbuh kembang anak.</li> <li>◊ E.7.3 Pemantauan tumbuh kembang anak.</li> <li>◊ E.7.4 Penyampaian hasil pemantauan tumbuh kembang anak kepada orang tua.</li> <li>◊ E.7.5 Koordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan peserta didik.</li> <li>◊ E.7.6 Penerapan PHBS.</li> <li>◊ E.7.7 Pemberian PMT dan/atau pemberian makanan dengan gizi sehat.</li> <li>◊ E.7.8 Pemantauan kepemilikan identitas peserta didik (NIK).</li> <li>◊ E.7.9 Ketersediaan fasilitas sanitasi.</li> </ul> </li> <li>• E.8 Indeks Kapasitas Perencanaan. <ul style="list-style-type: none"> <li>◊ E.8.1 Ketersediaan dokumen Perencanaan.</li> <li>◊ E.8.2 Ketersediaan dokumen pengorganisasian.</li> <li>◊ E.8.3 Ketersediaan dokumen pelaksanaan.</li> <li>◊ E.8.4 Pengisian Dapodik.</li> <li>◊ E.8.5 Pengisian SIPLah.</li> </ul> </li> <li>• E.9 Indeks Akuntabilitas Pembiayaan. <ul style="list-style-type: none"> <li>◊ E.9.1 Ketersediaan dokumen rencana anggaran tahun berjalan.</li> <li>◊ E.9.2 Ketersediaan dokumen administrasi keuangan.</li> <li>◊ E.9.3 Penyusunan RKAS dan pelaporan di aplikasi BOP.</li> </ul> </li> <li>• E.10 Pemanfaatan Sumber Daya Satuan. <ul style="list-style-type: none"> <li>◊ E.10.1 Penggunaan BOP untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain.</li> <li>◊ E.10.2 Penggunaan BOP untuk pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain.</li> <li>◊ E.10.3 Penggunaan BOP untuk pemenuhan administrasi satuan pendidikan.</li> </ul> </li> </ul>
--

Kriteria penilaian menggunakan indikator di atas dan secara umum struktur data yang menunjukkan hubungan antara dimensi, indikator level 1, dan indikator level 2 dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Gambar Struktur Dimensi, Indikator, dan Data

Interpretasi indeks dengan rentang 0 – 1 adalah semakin angka mendekati 1 kualitas lingkungan belajar untuk satuan PAUD tersebut dalam hal proses pembelajaran dan pengelolaan satuan PAUD telah memenuhi semua indikator yang menunjukkan bahwa satuan PAUD tersebut berkualitas.

Metode Penghitungan:

Skor masing-masing dimensi merupakan komposit dari skor-skor indikator level 1, yang berasal dari sekumpulan skor indikator level 2, yang diperoleh dari sekumpulan butir atau item data yang digunakan. Proses penskoran untuk setiap Dimensi dari data yang tersedia dapat dilihat dalam Gambar berikut ini.



Gambar Proses Penskoran

Langkah-langkah penskoran adalah:

- Penskoran Indikator Level 2.
  - Skor indikator level 2 merupakan komposit dari item/data yang berada “di bawahnya”.
  - Skor indikator level 2 didapatkan dengan mengalikan setiap item dengan bobotnya. Bobot item diambil melalui *loading factor* nya yang diperoleh secara empirik dari sampel data akreditasi menggunakan *principle component analysis* (PCA). Prosedur ini dipilih karena data-data yang tersedia merupakan *formative indicator* dari indikator-indikator level 2.
  - Untuk indikator yang hanya terukur melalui 2 item, skor item dirata-ratakan.
  - Untuk indikator yang hanya terukur melalui 1 item, skor item menjadi skor indikator.

## 2. Penskoran Indikator Level 1

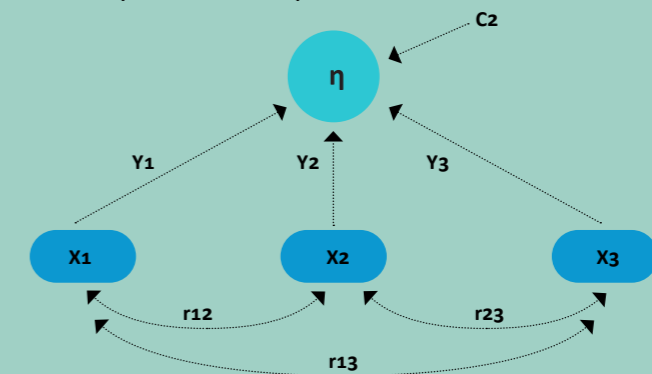
- Skor indikator level 1 merupakan komposit dari Indikator Level 2 yang berada “di bawahnya”.
- Skor indikator level 1 didapatkan dengan mengalikan setiap Indikator Level 2 dengan bobotnya. Bobot item diambil melalui *loading factor* nya yang diperoleh secara empirik dari sampel data akreditasi menggunakan *principle component analysis* (PCA). Prosedur ini dipilih karena indikator level 2 merupakan *formative indicator* dari indikator-indikator level 1, sehingga dengan model pengukuran seperti yang tertera pada Gambar 3, maka prosedur PCA merupakan prosedur yang paling tepat (Diamantopoulos & Winklhofer, 2001).
- Untuk indikator yang hanya terukur melalui 2 item, skor item dirata-ratakan.
- Untuk indikator yang hanya terukur melalui 1 item, skor item menjadi skor indikator.

## 3. Penskoran Dimensi D dan Dimensi E.

- Skor Dimensi D dan E merupakan komposit dari skor indikator level 1 yang berada “di bawahnya”.
- Skor indikator Dimensi D dan E didapatkan dengan mengalikan setiap indikator level 1 dengan bobotnya. Bobot indikator level 1 diambil melalui *loading factor* nya yang diperoleh secara empirik dari sampel data akreditasi menggunakan *principle component analysis* (PCA). Indikator level 1 merupakan *formative indicator* dari Dimensi D dan E sehingga prosedur PCA merupakan prosedur yang paling tepat (Diamantopoulos & Winklhofer, 2001).

## 4. Skor Komposit Keseluruhan.

- Skor komposit keseluruhan didapatkan dengan merata-ratakan skor Dimensi D dan Dimensi E.
- Indeks diperoleh dengan membagi skor komposit dengan maksimum skor yang dimungkinkan dan dinyatakan dalam angka proporsi yang bergerak antara 0 sampai 1, dalam 2 (dua) desimal. Penghitungan ini berlaku baik untuk indeks indikator level 2, level 1, Dimensi D dan E, maupun skor komposit keseluruhan.



Gambar Model Pengukuran Formatif dan Persamaannya

Satuan	:	Nilai
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. 2. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
Sumber Data	:	BAN PAUD
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Strategi Pencapaian	:	Melalui Program program PAUD yang berkaitan dengan peningkatan mutu (melalui program implementasi kurikulum, lingkungan belajar berkualitas, penjaminan mutu, dll)

### Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Program	: Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SP	: Meningkatkan pencapaian perkembangan anak
IKP	: 2.1.1. Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan PAUDHI
Definisi:	
<p>PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) adalah penanganan anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan, untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat.</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD Holistik Integratif, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhi Holistik Integratifnya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak.</p> <p>Tujuan PAUD Holistik Integratif, secara umum adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; sedangkan secara khusus adalah: (1) terpenuhi Holistik Integratifnya kebutuhan esensial anak usia dini secara; (2) terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada; (3) terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan (4) terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>Pelaksanaan PAUD HOLISTIK INTEGRATIF dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.</p> <p>Pendampingan PAUD HI dilakukan dengan memberikan bantuan kepada dinas kabupaten kota dengan tujuan untuk memfasilitasi kabupaten/kota untuk melaksanakan penguatan kapasitas satuan PAUD dalam melaksanakan layanan PAUDHI terintegrasi, melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan dan pengesahan peraturan bupati/walikota tentang PAUDHI;</li> <li>pembentukan gugus tugas PAUDHI bagi kabupaten/kota yang belum membentuk gugus tugas PAUDHI dan/atau koordinasi dalam rangka memperkuat kinerja gugus tugas PAUDHI melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUDHI.</li> <li>sosialisasi dan advokasi kebijakan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan PAUDHI dan/atau gugus tugas PAUDHI;</li> <li>bimbingan teknis peningkatan kapasitas penyelenggaraan PAUDHI di satuan PAUD;</li> <li>pendampingan bagi satuan PAUD peserta bimbingan teknis.</li> </ol>	
Metode Penghitungan:	
$= \frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan dalam penyediaan layanan PAUDHI (melalui pendampingan APBN)}}{\text{Jumlah Total Kabupaten/Kota di Indonesia}} \times 100\%$	
Satuan	: Persen (%)
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Sumber Data	: APBN
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

### Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Program	: Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SK	: Meningkatnya capaian perkembangan PAUD yang berkualitas
IKK	: 2.1.1.1. Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif
Definisi:	
<p>Persentase jumlah satuan PAUD yang telah memberikan layanan secara holistik integratif berdasarkan indikator pada Dapodik, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan kelas orang tua (dianggap memenuhi apabila Kelompok Pertemuan Orang Tua (KPO) tercekli).</li> <li>Pemantauan pertumbuhan anak (dianggap memenuhi apabila salah satu frekuensi pada jadwal pemeriksaan kesehatan dasar (berat, tinggi badan, dan lingkar kepala).</li> <li>Pemantauan perkembangan anak (dianggap memenuhi apabila salah satu frekuensi pada jadwal pemeriksaan detek dini tumbuh kembang (DDTK) tercekli).</li> <li>Koordinasi dengan unit terkait pemenuhan gizi dan kesehatan peserta didik (Dianggap memenuhi apabila mengisi "Ada" pada item Sistem Rujukan DDTK ke Puskesmas).</li> <li>Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (Dianggap memenuhi apabila salah satu frekuensi pada Pelaksanaan Kegiatan Cuci Tangan Berkelompok tercekli).</li> <li>Pemberian PMT dan/atau pemberian makanan dengan gizi sehat (Dianggap memenuhi apabila salah satu frekuensi pada Jadwal Pemberian Makanan Tambahan (PMTAS) tercekli).</li> <li>Pemantauan kepemilikan NIK Peserta Didik (Jumlah Peserta Didik yang ada NIK dibagi dengan seluruh jumlah PD. Dianggap memenuhi apabila persentase kepemilikan NIK oleh satuan lebih dari atau sama dengan 50%).</li> <li>Ketersediaan Fasilitas Sanitasi (Dianggap memenuhi apabila satuan memiliki 2 dari 3 fasilitas sanitasi, yaitu instalasi air dan jamban/toilet dengan air bersih, atau instalasi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir).</li> </ol> <p>Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD Holistik Integratif, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhi Holistik Integratifnya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak.</p> <p>Tujuan PAUD Holistik Integratif, secara umum adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; sedangkan secara khusus adalah: (1) terpenuhi Holistik Integratifnya kebutuhan esensial anak usia dini secara; (2) terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada; (3) terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan (4) terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>Pelaksanaan PAUD HOLISTIK INTEGRATIF dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.</p>	

Metode Penghitungan:	
= $\frac{\text{Jumlah satuan PAUD yang telah memenuhi minimal 5 dari 8 indikator PAUD HI di Dapodik}}{\text{seluruh jumlah satuan PAUD yang ada}} \times 100\%$	
Satuan	: Persen (%)
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Sumber Data	: Dapodik
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

Program	: Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SS	: 2. Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang
IKSS	: 1.2. Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum <ol style="list-style-type: none"> <li>Literasi</li> <li>Numerasi</li> </ol>

**Definisi:**  
 Asesmen Nasional (AN) adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar peserta didik yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama AN, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

AN diikuti oleh seluruh satuan pendidikan jenjang SD/MI/SDLB Sederajat, SMP/MTs/SMPLB Sederajat, SMA/MA/SMALB Sederajat, dan SMK/MAK. Populasi peserta AN adalah sebagai berikut.

1. Peserta didik kelas 5 jenjang SD/MI/SDLB Sederajat
2. Peserta didik kelas 8 SMP/MTs/SMPLB Sederajat
3. Peserta didik kelas 11 SMA/MA/SMALB Sederajat
4. Peserta didik kelas 11 SMK/MAK

Kemendikbudristek akan melakukan *sampling* terhadap populasi peserta AN tersebut pada setiap satuan pendidikan. Pada jenjang SD/MI/SDLB Sederajat, akan dipilih sampel peserta maksimal 30 orang per satuan pendidikan. Sementara itu, pada jenjang SMP/MTs/SMPLB Sederajat, SMA/MA/SMALB Sederajat, dan SMK/MAK, akan dipilih sampel peserta maksimal 45 orang per satuan pendidikan.

Pada AN, AKM mengukur dua macam literasi, yaitu Literasi Membaca (Baca: Literasi) dan Literasi Matematika (Baca: Numerasi). Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua peserta didik. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran.

Kemampuan literasi dan kemampuan numerasi peserta didik dibagi menjadi empat kategori/level yaitu:

Level Kompetensi	
Literasi	Numerasi
<p><b>Perlu intervensi khusus</b>            Peserta didik belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana.</p>	<p><b>Perlu intervensi khusus</b>            Peserta didik hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Peserta didik menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas.</p>
<p><b>Dasar</b>            Peserta didik mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana.</p>	<p><b>Dasar</b>            Peserta didik memiliki keterampilan dasar matematika: komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin.</p>
<p><b>Cakap</b>            Peserta didik mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks; mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks.</p>	<p><b>Cakap</b>            Peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang beragam.</p>
<p><b>Mahir</b>            Peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks; mengevaluasi isi; kualitas; cara penulisan suatu teks; dan bersikap reflektif terhadap isi suatu teks.</p>	<p><b>Mahir</b>            Peserta didik mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya.</p>

Nilai batas pada masing-masing level kemampuan ditentukan berdasarkan hasil *standard setting* yang dilakukan bersama guru, dosen, dan praktisi penilaian. Peserta didik dinilai telah memenuhi kompetensi minimum apabila telah mencapai level cakap.

Pengukuran literasi dan numerasi merupakan upaya untuk mendorong guru agar lebih berfokus pada pengembangan daya nalar daripada pengetahuan konten yang luas tapi dangkal. Bersama dengan hasil survei karakter dan survei lingkungan belajar, hasil pengukuran literasi dan numerasi pada AN ini diharapkan dapat menghasilkan potret komprehensif yang berguna bagi sekolah/madrasah dan Pemda untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan.

**Metode Penghitungan:**  
 Penghitungan dilakukan per kompetensi (literasi/numerasi) per jenjang dengan rumus sebagai berikut.

$$a = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_4}{4}$$

$$b = \frac{b_1 + b_2 + b_3 + b_4}{4}$$

Dimana  $a_{in} \text{ atau } b_{in} = \frac{\sum (c_{in} \times d_{in})}{\sum c_{in}}$

$i$  = 1, 2, 3, 4 (1=SD/MI/SDLB; 2=SMP/MTs/SMPLB; 3=SMA/MA/SMALB; 4=SMK/MAK)

$n$  = satuan pendidikan ke-1, 2, 3, ..., n

$a$  = Persentase peserta didik di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi literasi

- $b$  = Persentase peserta didik di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi numerasi
- $a_1$  = Persentase peserta didik SD/MI/SDLB Sederajat di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi literasi
- $a_2$  = Persentase peserta didik SMP/MTs/SMPLB Sederajat di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi literasi
- $a_3$  = Persentase peserta didik SMA/MA/SMALB Sederajat di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi literasi
- $a_4$  = Persentase peserta didik SMK/MAK Sederajat di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi literasi
- $b_1$  = Persentase peserta didik SD/MI/SDLB Sederajat di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi numerasi
- $b_2$  = Persentase peserta didik SMP/MTs/SMPLB Sederajat di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi numerasi
- $b_3$  = Persentase peserta didik SMA/MA/SMALB Sederajat di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi numerasi
- $b_4$  = Persentase peserta didik SMK/MAK Sederajat di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi numerasi
- $c$  = Bobot sampling pada satuan pendidikan tertentu
- $d$  = Persentase peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang mencapai nilai di atas batas kompetensi minimal (literasi/numerasi)

Satuan	: Persen (%)
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. 2. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
Sumber Data	: Inventori Data Hasil Asesmen Nasional
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
Strategi Pencapaian	: 1. Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; Penerapan Perencanaan Berbasis Data (Dapodik, ARKAS, SPM); Penerapan Kurikulum Merdeka; Dukungan Asesmen Nasional; Digitalisasi Sekolah. 2. Perencanaan berbasis data berdasarkan hasil monitoring dari segi input, proses sampai dengan hasil (PAUDDASMEN). 3. Implementasi Kurikulum Merdeka, dengan tujuan peningkatan kualitas pembelajaran (BSKAP dan PAUDDASMEN). 4. Peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran literasi dan numerasi (GTK). 5. Program kampus mengajar untuk penguatan literasi numerasi di jenjang pendidikan dasar (Dikti dan Vokasi).

**Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**

SP	: Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan
IKP	: 2.2.1. Jumlah satuan pendidikan yang menjadi sekolah penggerak

**Definisi:**

Sekolah Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Visi Pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis; kreatif; mandiri; beriman bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; bergotong royong dan berkebinekaan global.

Program Sekolah Penggerak antara lain:

1. Pendampingan konsultatif dan asimetris.
2. Penguatan SDM di sekolah.
3. Pembelajaran dengan paradigma baru.
4. Perencanaan berbasis data.
5. Digitalisasi sekolah.

Penetapan sekolah penggerak berdasarkan keputusan Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, setelah mengikuti serangkaian seleksi yang dikoordinasikan bersama dengan Ditjen GTK.

**Metode Penghitungan:**

Jumlah satuan pendidikan yang ditetapkan menjadi sekolah penggerak sesuai SK yang telah diterbitkan

Satuan	: Sekolah
Tipe Penghitungan	: Kumulatif
Unit Pelaksana	: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Sumber Data	: Database Sekolah Penggerak
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

<b>Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran</b>	
SK	: Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas
IKK	: 2.2.1.1. Jumlah PAUD Penggerak
<b>Definisi:</b>	
Satuan PAUD Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Visi Pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis; kreatif; mandiri; beriman bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; bergotong royong dan berkebinekaan global.	
Program Sekolah Penggerak antara lain:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan konsultatif dan asimetris.</li> <li>2. Penguatan SDM di sekolah.</li> <li>3. Pembelajaran dengan paradigma baru.</li> <li>4. Perencanaan berbasis data.</li> <li>5. Digitalisasi sekolah.</li> </ol>	
Penetapan sekolah penggerak berdasarkan keputusan Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, setelah mengikuti serangkaian seleksi yang dikoordinasikan bersama dengan Ditjen GTK.	
<b>Metode Penghitungan:</b>	
Jumlah satuan pendidikan PAUD Penggerak sesuai SK yang telah terbit	
Satuan	: Lembaga
Tipe Penghitungan	: Kumulatif
Unit Pelaksana	: Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Sumber Data	: Database Sekolah Penggerak
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

<b>Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran</b>	
SP	: Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan
IKP	: 2.2.2. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru
<b>Definisi:</b>	
Jumlah satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum paradigma baru tersebut akan mulai digunakan di Sekolah Penggerak, yang selanjutnya akan terus bertambah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan lainnya. Sekolah yang baru menerapkan kurikulum paradigma baru perlu mendapatkan pendampingan dalam implementasinya, agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan.	
<b>Metode Penghitungan:</b>	
$= \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru}}{\text{Jumlah satuan pendidikan}} \times 100\%$	
Satuan	: Persen (%)
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Sumber Data	: Dapodik
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

## Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

<b>Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran</b>	
SK	: Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas
IKK	: 2.2.2.1. Persentase satuan PAUD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru
<b>Definisi:</b>	
Jumlah satuan PAUD penggerak yang menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum paradigma baru tersebut akan mulai digunakan di Sekolah Penggerak, yang selanjutnya akan terus bertambah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan lainnya. Sekolah yang baru menerapkan kurikulum paradigma baru perlu mendapatkan pendampingan dalam implementasinya, agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan.	
<b>Metode Penghitungan:</b>	
$= \frac{\text{Jumlah satuan PAUD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru}}{\text{Jumlah seluruh satuan PAUD}} \times 100\%$	
Satuan	: Persen (%)
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Sumber Data	: Dapodik yang diolah
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

<b>Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran</b>	
SP	: Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran
IKP	: 2.2.7. Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran
<b>Definisi:</b>	
Satuan pendidikan yang didampingi dalam perbaikan mutu pembelajaran melalui profil dan rapor pendidikan. Pendampingan dilakukan melalui program kegiatan direktorat dan juga dengan pemberian bantuan kepada prov/kab/kota untuk meningkatkan mutu pembelajaran ke satuan pendidikan di wilayahnya.	
Pemanfaatan profil dan rapor pendidikan oleh satuan pendidikan digunakan untuk mengevaluasi secara keseluruhan proses belajar mengajar antara guru dan peserta didik yang didukung dengan sarana dan prasana yang ada di sekolah. Selain itu, profil dan rapor pendidikan akan digunakan oleh satuan pendidikan dalam memfasilitasi perencanaan penganggaran, pelaksanaan pembelajaran dan penatausahaan di sekolah.	
<b>Metode Penghitungan:</b>	
$= \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran}}{\text{Jumlah seluruh satuan pendidikan}} \times 100\%$	
Satuan	: Persen (%)
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Sumber Data	: Profil dan Rapor Pendidikan
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

## Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	
SK	: Meningkatkan pembelajaran PAUD yang berkualitas
IKK	: 2.2.7.1. Persentase satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran
Definisi:	
Satuan PAUD yang didampingi dalam meningkatkan mutu pembelajaran untuk peningkatan mutu pendidikan daerah melalui profil dan rapor mutu pendidikan daerah. Pendampingan dilakukan melalui program kegiatan direktorat dan juga dengan pemberian bantuan kepada kab/kota untuk meningkatkan mutu pembelajaran satuan PAUD di wilayahnya.	
Tujuan dari pendampingan mutu yaitu:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan capaian perkembangan anak;</li> <li>meningkatkan pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini;</li> <li>meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Satuan Pendidikan anak usia dini;</li> <li>meningkatkan kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan anak usia dini; dan</li> <li>meningkatkan jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.</li> </ol>	
Metode Penghitungan:	
$= \frac{\text{Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran}}{\text{Jumlah satuan PAUD secara keseluruhan}} \times 100\%$	
Satuan	: Persen (%)
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Sumber Data	: Laporan Internal
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	
SK	: Meningkatkan pembelajaran PAUD yang berkualitas
IKK	: 2.2.7.2. Persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas
Definisi:	
satuan PAUD yang memiliki perangkat pendidikan yang berkualitas dengan indikator-indikator yaitu:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki minimal satu judul buku bacaan PAUD.</li> <li>Memiliki minimal satu komputer/Laptop.</li> <li>Memiliki minimal satu APE bahan alam.</li> <li>Memiliki minimal satu tambahan APE lainnya yang terdata dalam Dapodik.</li> </ol>	
Metode Penghitungan:	
$= \frac{\text{Jumlah Satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas}}{\text{Jumlah satuan PAUD secara keseluruhan}} \times 100\%$	
Satuan	: Persen (%)
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Sumber Data	: Dapodik yang diolah
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan



## Lampiran 2

### PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN RENSTRA AWAL DAN RENSTRA PENYEMPURNAAN DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2022

SEMULA										MENJADI				
Kode	Uraian	Satuan	Target				Kode	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Target			
			2020	2021	2022	2023					2024	2022	2023	2024
SS	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang						SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang						
IKSS	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	40,20	42,62	45,21	47,81	53,1	Angka Kesiapan Sekolah	%	74,96	75,38	75,59	75,79	
SP	Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun						SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah						
IKP	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)	%	66,49	68,06	69,63	71,2	72,77	Persentase Kab/Kota dengan Angka Kesiapan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun diatas 75	%	63,42	63,81	64,20	64,59	
SK	Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas						SK	Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas						
IKK	Jumlah Kab/Kota dengan Persentase Siswa Kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	Kab/Kota	103	154	206	257	267	Jumlah satuan PAUD penerima program afirmasi	Lembaga	-	105	108	110	
SP	Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun													
IKP	Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)	Kab/kota	6	56	106	156	206							
SK	Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas						SK	Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas						
IKK	Jumlah Kab/Kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,1%	Kab/Kota	115	135	155	175	195	Jumlah satuan PAUD menerima program afirmasi	Lembaga	-	105	108	110	
IKK	Jumlah Peserta Didik usia 3-6 tahun yang menerima BOP PAUD	Juta Orang	7,5	8,7	10	11,2	12,7							
SS	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang						SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang						
IKSS	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	Nilai	3	3,25	3,5	3,75	4	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD	Nilai	0,49	0,51	0,52	0,53	
SP	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah						SP	Meningkatnya pencapaian perkembangan anak						

SEMULA										MENJADI				
Kode	Uraian	Satuan	Target				Kode	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Target			
			2020	2021	2022	2023					2024	2022	2023	2024
IKP	Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai scorecard minimum 75 (kategori tinggi)	%	0	5	10	15	20	Persentase Kab/kota yang menyediakan layanan PAUDHI	%	9,73	29,19	38,92	48,64	
SK	Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas						SK	Meningkatnya capaian perkembangan PAUD yang berkualitas						
IKK	Persentase PAUD yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%	0	5	10	15	20							
IKK	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	%	25	35	47	60	75	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	%	25,78	31	33	36	
SP	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah						SP	Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum						
IKP	Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak	Lembaga	0	4503	6614	8729	10000	a. Literasi	%	43	47,5	49,75	52	
SK	Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas						SK	b. Numerasi	%	22,9	28,3	29,2	30,1	
IKK	Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak	Lembaga	0	626	776	926	1076	Meningkatnya nilai asesmen kompetensi satuan pendidikan	(literasi dan numerasi)	-	9.100	14.100	19.100	
SP	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah						SP	Jumlah satuan pendidikan yang menjadi sekolah penggerak	Sekolah	-	2000	3150	4300	
IKP	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan	%	58,7	64,7	70,7	76,7	85	Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas	Lembaga	-	2000	3150	4300	
SK	Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas						SK	Jumlah PAUD Penggerak	Lembaga	-	2000	3150	4300	
IKK	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	Nilai	3	3,25	3,5	3,7	4							
IKK	Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%	20	40	55	65	80							

